

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Cetakan ke-2)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi ke-2)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1983.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013.

SUMBER LAIN:

a. Peraturan-peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298).

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTA).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.

b. Jurnal

Hasyim, Muhammad Irsyad “Perlindungan Hak Cipta bagi Pengunggah Video Youtube yang Digunakan oleh Stasiun Televisi”, 2008.

Kaunang, Valentine Felisya, "Pengunduhan Ilegal Musik Digital (MP3) melalui Jasa Layana Internet sebagai dari Hak Cipta", *Lex Privatum Vol. 1 No. 2 April-Juni*, 2013.

Kusuma, Made Adi & Ni Ketut Supasti Darmawan, "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana", *Kerta Wicara Volume 2 No.1*, 2013.

Raharjo, Agus, "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 1 Februari*, 2012.

Rohmah, Usisa, "Analisis Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dalam Menangani Laporan/Keluhan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", *Politika Volume 4 Nomor 1 April*, 2013.

c. Karya Ilmiah

Anggarasena, Bima, "Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum", *Tesis Program Masgister Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2010.

Avianti, Fransisca, "Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, 2008.

Fajar, Rizki, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Koordinasi dan Supervisi dalam Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, 2011.

Lumban, Happy Abriani, "Orientasi Etis, Sikap Konsumen, dan Perilaku Pengunduhan MP3 Secara Ilegal", *Skripsi Fakultas Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Ristawandari, Vivin, "Kedudukan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana", *Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.

d. Website/Internet

Kedudukan PPNS dalam Penegakan Hukum (Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia), <https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 5 Mei pukul 01.33 WIB.

Kemkominfo Tutup 22 Situs Musik Ilegal, 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5652c6e16ca2a/kemenkominfo-tutup-22-situs-musik-ilegal>, diakses pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 19.04 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi-djki>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 11.38 WIB.

